



Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Tuna Wisma Di Kota Padang

Indah Flecia Putri¹, Clarissa Amanda², Nanda Novirza³, Nurfaiza⁴, Olivia Dwi Ruselda⁵

^{1,2,3,4,5} FIS, Universitas Negeri Padang

Korespondensi penulis: indahfleciaputri1102@gmail.com

Abstract. *The high number of homeless people in the city of Padang is caused by economic and cultural factors in the community. The most important thing that must be considered by social services is the guidance of the homeless. Because at certain times the homeless population increases, such as on holidays, religious holidays, or in recreation centers. However, if due to the family's unfavorable economic conditions, it becomes a factor for children to go to the streets to work to help their parents. Homeless people are a city community, their presence is closely related to the environmental conditions of the children's community. Homeless people who have been netted cannot be sure that they will not take to the streets again. This is due to various reasons, such as economic needs that are still not fulfilled and there are no other activities that can generate money, forcing the child to take to the streets again. One of the programs for dealing with homeless people at the Social Service is working with Satpol PP to screen homeless people. So the guidance for families that must be carried out by social services is by empowering the family economy which creates independence, so that finally with the various coaching programs provided, both to the child and to his family it is hoped that they will not return to the streets again. The purpose of this study was to find out how the role of the Padang City Social Service in dealing with existing homeless people. Implementation of this research using descriptive qualitative method. The results of this study found how the role of the Padang City Social Service in dealing with the existing Homeless, as well as how the efforts were made and the inhibiting factors in handling the Homeless.*

Keywords: Roles, Social Services, Homelessness

Abstrak. Tingginya angka tuna wisma di kota Padang yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan budaya masyarakat. Hal terpenting ini juga harus diperhatikan oleh dinas sosial adalah pembinaan terhadap tuna wisma tersebut. Karena diwaktu tertentu populasi tuna wisma meningkat, seperti dihari libur, hari raya keagamaan, maupun di pusat-pusat rekreasi. Namun jika karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung menjadi faktor anak turun ke jalanan untuk bekerja membantu orang tuanya. Tuna Wisma merupakan komunitas kota, kehadiran mereka sangat erat hubungannya dengan kondisi lingkungan komunitas anak. Tuna Wisma yang telah terjaring, tidak dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan turun ke jalanan lagi. Hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan, seperti kebutuhan ekonomi yang masih belum tercukupi dan tidak adanya aktifitas lain yang dapat menghasilkan uang sehingga memaksa anak tersebut untuk turun ke jalanan lagi. Salah satu program penanganan Tuna Wisma di Dinas Sosial yaitu bekerja sama dengan Satpol PP untuk penjaringan Tuna Wisma. Maka pembinaan terhadap keluarga yang harus dilakukan oleh dinas sosial adalah dengan pemberdayaan ekonomi keluarga yang menciptakan kemandirian, sehingga akhirnya dengan berbagai program pembinaan yang diberikan, baik kepada si anak maupun kepada keluarganya diharapkan mereka tidak kembali lagi ke jalanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Padang dalam menangani tunawisma yang ada. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bagaimana peran Dinas Sosial Kota Padang dalam menangani Tunawisma yang

ada, serta bagaimana Upaya yang dilakukan dan faktor-faktor penghambat penanganan Tunawisma.

Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, Tunawisma.

LATAR BELAKANG

Pemerintahan Kota Padang membuat kebijakan penanganan tuna wisma, namun ternyata masih belum bisa menjangkau tuna wisma secara keseluruhan. Bahkan masih banyak tunawisma yang sudah dilakukan pembinaan, namun masih kembali ke jalanan lagi. Terlepas dari pembinaan yang diberikan kepada tuna wisma agar mereka terampil dan mandiri dalam menuju kedewasaan nantinya, untuk itu pemerintahan dan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial.

Tingginya angka tuna wisma di kota Padang yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan budaya masyarakat. Hal terpenting ini juga harus diperhatikan oleh dinas sosial adalah pembinaan terhadap tuna wisma tersebut. Karena diwaktu tertentu populasi tuna wisma meningkat, seperti dihari libur, hari raya keagamaan, maupun di pusat-pusat rekreasi. Namun jika karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung menjadi faktor anak turun ke jalanan untuk bekerja membantu orang tuanya.

Tuna wisma merupakan salah satu jenis masalah sosial yang umum dihadapi pemerintah. Indonesia merupakan Negara yang tingkat tuna wisma cukup tinggi. Dalam tahun-tahun belakangan ini, di Kota padang barat besar menunjukkan adanya sebuah peningkatan tuna wisma. Peningkatan kegiatan mereka ini tidak saja dalam jumlahnya yang terus membesar, sekalipun angka pastinya belum dimiliki instansi terkait. Namun jenis kegiatannya makin berkembang. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Dinas Sosial dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada tuna wisma, belum memberikan solusi terbaik bagi permasalahan tuna wisma terutama di Kota Padang. Kota Padang memiliki jumlah tuna wisma yang terkesan tinggi terbukti dari banyaknya tuna wisma yang ditemui ditempat-tempat umum seperti di lampu Lalu Lintas, dipusat perbelanjaan pasar dan tempat keramaian lainnya. Sehingga tuna wisma memanfaatkan situasi dan keramaian di beberapa titik di Kota Padang dengan Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Dinas Sosial dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada Tuna Wisma, belum memberikan solusi terbaik bagi permasalahan Tuna Wisma terutama di Kota Padang.

Persoalan yang perlu mendapat perhatian, yang harus ditangani dengan serius oleh Dinas Sosial Kota Padang. Tuna Wisma merupakan komunitas kota, kehadiran mereka sangat erat hubungannya dengan kondisi lingkungan komunitas anak. Tuna Wisma yang telah

terjaring, tidak dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan turun ke jalanan lagi. Hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan, seperti kebutuhan ekonomi yang masih belum tercukupi dan tidak adanya aktifitas lain yang dapat menghasilkan uang sehingga memaksa anak tersebut untuk turun ke jalanan lagi. Salah satu program penanganan Tuna Wisma di Dinas Sosial yaitu bekerja sama dengan Satpol PP untuk penjarangan Tuna Wisma.

Maka pembinaan terhadap keluarga yang harus dilakukan oleh dinas sosial adalah dengan pemberdayaan ekonomi keluarga yang menciptakan kemandirian, sehingga akhirnya dengan berbagai program pembinaan yang diberikan, baik kepada si anak maupun kepada keluarganya diharapkan mereka tidak kembali lagi ke jalanan.. Karena diwaktu tertentu populasi tuna wisma meningkat, seperti dihari libur, hari raya keagamaan, maupun dipusat-pusat rekreasi. Dari uraian tersebut tergambar bahwa penulis menganalisis peran dinas sosial dalam penanganan tuna wisma di Kota Padang.

KAJIAN TEORITIS

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Kondisi sosial di Kota Padang masyarakatnya sudah dapat dikatakan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat diantaranya melalui dua aspek yakni, kondisi umum kesehatan dan pemerataan sarana dan prasarana atau bisa disebut dengan kualitas hidup dan infrastruktur. Bila dilihat secara singkat kondisi umum kesehatan di Kota Padang sudah sangat baik. Sedangkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana infrastrukturnya juga semakin meningkat, dengan demikian kedua aspek kesejahteraan sudah dapat terpenuhi. Apabila kedua aspek sudah dapat dipenuhi maka jaminan untuk melakukan investasi di Kota Padang sudah tidak dikhawatirkan lagi.

Peran dinas sosial untuk penanganan gelandangan (tuna wisma) adalah melakukan pembinaan sebagaimana yg diamanatkan oleh peraturan daerah kota padang no. 01 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan. Peraturan daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang berlaku mengenai pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan mapun para pelaku eksploitasi di Kota Padang.

Tuna wisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan dengan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, pinggir jalan, taman kota, stasiun kereta api, fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Artidjo Alkostar (Suroto, 2004: 20). Faktor-faktor yang mengakibatkan munculnya Tunawisma. Mulai dari

permasalahan psikologis, kerenggangan hubungan dengan orang tua, atau keinginan untuk hidup bebas. Namun alasan yang terbanyak dan paling umum adalah kegagalan para perantau dalam mencari pekerjaan. Sebagai gejala sosial masalah tuna wisma sudah lama hadir ditengah-tengah kita.

Secara formal pemerintah telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah ini. Hal tersebut dapat dibaca dalam UUD 1945, bab XIV, pasal 34 dimana tertulis bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Sejalan dengan ini Departemen Sosial telah menyusun program yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk menampung dan mengatasi masalah anggota masyarakat yang tergolong fakir miskin dan anak terlantar. Namun kenyataan lain menunjukkan bahwa disekeliling kita masih ada anggota masyarakat miskin atau sebagai anak terlantar sehingga menimbulkan masalah gelandangan. Adapun penyebab dari banyaknya tunawisma adalah seperti kemiskinan yang disebabkan Ketidakmampuan dalam membeli kebutuhan pokok seperti diantaranya perumahan, makanan, pendidikan, dan lebih banyak lagi akan meningkatkan risiko seseorang atau suatu keluarga, selain itu juga karena kurangnya perawatan kesehatan yang terjangkau, dan banyaknya pengangguran.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002) bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara studi kasus dengan tujuan memperoleh data yang sesuai permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian adalah dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada kantor dinas sosial Kota Padang. Setelah ini menganalisis data menggunakan teknik redaksi data (memilih hal-hal pokok yang relevan dengan penelitian), display data (memungkinkan penyajian data melalui matrix dan grafik sesuai kebutuhan penelitian), serta verifikasi data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial dalam menangani tingginya kasus Tuna Wisma di Padang

Menurut Markum (dalam Fu'adah, dkk, 2017:45), Tunawisma merupakan orang miskin yang tidak memiliki rumah dan biasanya tinggal di taman kota, pinggir jalan, tenda atau tempat-tempat yang disediakan oleh lembaga sosial. Tuna wisma merupakan individu atau kelompok orang yang bertahan hidup akibat tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, sehingga hidupnya dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang yakni Dinas Sosial sangat berperan dalam menangani banyaknya tunawisma yang ada di Kota Padang. Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memang banyak permasalahan sosial yg terjadi seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pemulung. Peran dinas sosial untuk penanganan gelandangan (tuna wisma) adalah melakukan pembinaan sebagaimana yg diamanatkan oleh peraturan daerah kota padang no. 01 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan. Peraturan daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang berlaku mengenai pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan maupun para pelaku eksploitasi di Kota Padang, ketentuan baku tersebut meliputi :

1. Mengembangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjut dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, yang melakukan aktifitas di jalan, dengan mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaan mereka di jalan, agar dapat menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pemberdayaan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan mastabat manusia.
2. Mempetakan identitas, asal usul anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan guna dijadikan dasar pembinaan pencegahan, pembinaan lanjut dan rehabilitasi sosial.
3. Mengklasifikasikan kriteria pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.
4. Membangun persepsi yang sama dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga maupun perorangan.

5. Mengupayakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana agar anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan mendapatkan pendampingan secara kuantitas maupun kualitas.
6. Membangun sinergi antar dinas terkait maupun dengan lembaga sosial, termasuk perguruan tinggi agar terbentuk jaringan yang koprehensif dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Kota Padang
7. Dengan demikian maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong, mendukung, meningkatkan, memberdayakan dan mengembangkan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan agar kembali menjadi manusia yang bermartabat.

Dengan adanya peraturan daerah Kota Padang 01 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan ini menjadi landasan bagi Dinas sosial dalam membantu tugasnya dalam mengurangi angka tunawisma yang ada di Kota Padang.

B. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Dinas Sosial untuk Mengurangi Tuna Wisma di Kota Padang

Adapun Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Dinas Sosial dalam mengurangi Tuna Wisma di Kota Padang adalah sebagai berikut.

1. Usaha Preventif

Usaha preventif merupakan suatu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, serta pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan juga pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga kemudian akan tercegah terjadinya. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas sosial di Kota Padang untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah, penyebaran dan kompleksitas permasalahan berkenaan dengan gelandangan (tuna wisma).

Usaha ini meliputi ,

- a. Pendataan,
- b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- c. Sosialisasi
- d. Kampanye
- e. Penguatan lembaga sosial yg peduli.

2. Usaha Represif

Usaha Represif adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Lembaga ataupun yg bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan serta pengemis, serta bagaimana mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha represif dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dinas Sosial di Kota Padang untuk mengurangi dan meniadakan Tunawisma.

Usaha represif dilakukan dengan cara :

a) Penjangkauan

Penjangkauan ini dilakukan melalui razia yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP bersama-sama dengan Kepolisian. Gelandangan dan pengemis yang terkena razia akan ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.

b) Seleksi

Seleksi dilakukan untuk menetapkan kualifikasi bagi para gelandangan dan pengemis. Selain itu, sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya.

3. Usaha Rehabilitasi

Usaha rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang agar fungsi sosial gelandangan berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Usaha rehabilitasi ini dilakukan dengan cara :

a. Penampungan

b. Seleksi

c. Penyantunan

d. Penyaluran dan tindak lanjut.

Usaha rehabilitasi dilaksanakan melalui panti sosial. Pemerintah dan Dinas Sosial Kota Padang bekerjasama dalam Upaya mengurangi banyaknya tunawisma yang ada di kota Padang. Selain Upaya diatas, pemerintah juga sudah berupaya membuat penampungan bagi warga kota Padang khusus gelandangan dan pemulung sebagai Upaya mengurangi tunawisma yang ada di Kota Padang. Warga kota Padang khusus gelandangan dan pemulung sudah mempunyai tempat penampungan khusus. Pemerintah Kota Padang sudah menyediakan tempat penampungan bagi Gelandangan dan pemulung yang tidak mempunyai punya rumah tempat penampungan tunawisma bernama “Desaku Menanti” yang dibuat sebanyak 40 unit rumah yg terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

3. Faktor Penghambat dalam Menangani Kasus Tuna Wisma di Kota Padang

Gelandangan (tuna wisma) merupakan salah satu dari penyandang masalah kesejahteraan sosial yg terjadi dimasyarakat Kota Padang. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat

dalam penanggulangan tunawisma dan faktor inilah yang menjadikan banyaknya tunawisma di Kota Padang, diantaranya yaitu:

1. Daya dorong dari desa

- a. Desa tidak lagi mampu memberikan pekerjaan dan penghidupan yg layak, sementara jumlah penduduk terus bertambah.
- b. Tingkat pendidikan rendah
- c. Faktor sosial budaya masyarakat.
- d. Kondisi alam pedesaan tidak menunjang kegiatan ekonomi.
- e. Secara individu warga desa rawan jadi gelandangan dan pengemis mempunyai sifat pemalas.

2. Daya tarik kota

- a. Masyarakat menganggap dikota besar mudah mencari pekerjaan dan mewujudkan impian.
- b. Dikota tersedia banyak cara untuk dapat memperoleh uang.
- c. Adanya ajakan ,/ bujukan teman

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa masyarakat datang ke kota untuk mencari pekerjaan sangat sulit dan tidak mempunyai keterampilan, sehingga dapat mengakibatkan mereka menjadi pengemis dan tidak punya tempat tinggal, Hingga mereka menjadi gelandangan (tuna wisma). Pada umumnya yg menjadi gelandangan adalah masyarakat dari daerah luar Kota Padang dan tidak punya tempat tinggal sehingga menjadi gelandangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tuna wisma merupakan individu atau kelompok orang yang bertahan hidup akibat tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, sehingga hidupnya dalam keadaan tidak sesuai dengannorma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang yakni Dinas Sosial sangat berperan dalam menangani banyaknya tunawisma yang ada di Kota Padang. Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memang banyak permasalahan sosial yg terjadi seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pemulung. Peran dinas sosial untuk penanganan gelandangan (tuna wisma) adalah melakukan pembinaan sebagaimana yg diamanatkan oleh peraturan daerah kota padang no. 01 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Dinas Sosial dalam mengurangi Tuna Wisma di Kota Padang adalah sebagai berikut.

1. Usaha Preventif, Usaha preventif merupakan suatu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, serta pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan juga pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemis, sehingga kemudian akan tercegah terjadinya.
2. Usaha Represif, Usaha Represif adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Lembaga ataupun yg bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan serta pengemis, serta bagaimana mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
3. Usaha Rehabilitasi, Usaha rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang agar fungsi sosial gelandangan berperan kembali sebagai warga masyarakat. Jadi disimpulkan bahwa masyarakat datang ke kota untuk mencari pekerjaan sangat sulit dan tidak mempunyai keterampilan, sehingga mengakibatkan mereka menjadi pengemis dan tidak punya tempat tinggal, Hingga mereka menjadi gelandangan (tuna wisma).

B. Saran

Dari penelitian yang di lakukan, diharapkan perlu adanya revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2012 tentang “Pembinaan Anak Jalanan ,gelandangan,pengemis,pengamen Dan Pedagang asongan di Kota Padang kepada peraturan yang lebih efektif dan rasional untuk menjawab permasalahan anak jalanan,gelandangan,pengemis ,pengamen dan pedagang di Kota Padang. Peraturan yang bukan sekedar menghapus gepeng bukan dari jalanan, melainkan harus memperhatikan jaminan dan perlindungan sosial Anak Jalanan ,gelandangan,pengemis,pengamen Dan Pedagang asongan di Kota Padang sebagaimana yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta Dinsosnaker Kota Padang, diharapkan adanya peningkatan kinerja, koordinasi dan sinergi dari lembaga/aparat penegak hukum terkait yaitu Satpol PP Kota Padang,Polresta Kota Padang dan Dinas Sosial Tingkat Provinsi, LSM, dan lembaga terkait lainnya dalam Penanganan Anak Jalanan ,gelandangan,pengemis,pengamen dan Pedagang asongan di Kota Padang secara teknis, perlu dilakukan program-program Anak Jalanan ,gelandangan,pengemis,pengamen Dan Pedagang asongan di Kota Padang yang berbasis masyarakat, sehingga diharapkan adanya tindakan kolektif untuk mewujudkan masyarakat yang dapat hidup lebih mandiri untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonominya. Selain itu, upaya preventif sangat perlu dilakukan, seperti sosialisasi, pendekatan persuasif dan bimbingan sosial kepada masyarakat, khususnya pengarahan akan pentingnya pendidikan orangtua terhadap anak. Dengan begitu diharapkan dapat mengatasi persoalan gepeng mulai dari akarnya, sehingga terwujud perubahan menuju kota yang lebih tertib.

DAFTAR REFERENSI

- Ali. (1990). *Gelandangan dan Penanganan*. Jakarta: Grasindo.
- Arif, M. A., Saleh, R., Delfiro, R., Afifi, R. F., & Yendra, W. (2022, November). *Efektivitas Layanan Online Sapo Rancak Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Padang*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 2, pp. 70-79).
- Arifin, S. (2023). *Solidaritas Komunitas Manusia Silver Dalam Mempertahankan Hidup Dan Ekonomi Keluarga Di Persimpangan Lampu Merah Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang*. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(2), 34-48.
- Enno. (2010). *Masalah Gelandangan di Kota*. (<http://h41zone.blogspot.com>), Diakses pada tanggal 9 Februari 2010.
- Fatmi, S. N., Syamsir, S., Aulia, N., Regina, P., Agustina, T., & Putra, G. F. (2022, November). *Implementasi Aplikasi Bank Sampah Pancadaya Dalam Mewujudkan Good Governace Di Kuranji Kota Padang*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 2, pp. 95-108).
- Febria, D. (2023). *ONLINE COLLABORATIVE WRITING TO ENHANCE STUDENTS' WRITING MOTIVATION AND WRITING ABILITY*. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(2), 132-144.
- HASIBUAN, Putri Yanti; PANE, Samsul Bahri. *PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI TUNA WISMA DI KOTA MEDAN*. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 2019, 8.2: 206-212. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2012/PerdaPadang1-2012.pdf> diakses 23 Juni 2023.
- Lestari, A. D., Haila, H., & Fauzi, A. (2023). *Pengelolaan Program Unit Pelatihan Keliling (Mobile Training Unit) Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat*. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(2), 81-92.
- MARYATUN, Maryatun; RAHARJO, Santoso Tri; TAFTAZANI, Budi Muhammad. *UPAYA PENANGANAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS*. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2022, 8.1.
- Misnawati, M. (2023, April). *ChatGPT: Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 2, No. 1, pp. 54-67).
- Misnawati, M. (2022). *Kalimat Efektif dalam Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi Relasi Berkebutuhan Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020*. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 2(2), 228-239.
- Nadila, S. B., Prayitno, R. D., Indrawati, A., Wardana, L. V., & Mahendra, A. M. (2023). *Problems of Implementing Business Education in Early Childhood Education (PAUD): Systematic Literature Review (SLR)*. *International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities*, 1(2), 66-78.
- NUR, Muhammd Yusuf Reski Paldi. *Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Siyasa Dusturiyah Tasyiriyah*. 2022. PhD Thesis. IAIN PARE PARE.
- Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata "Kampung Kokolaka" Kelurahan Jatirejo Kota Semarang*. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(2), 34-44.
- Simanullang, P. (2023). *DIGITALIZATION MANAGEMENT: ENHANCED TOURIST ENGAGEMENT BAH KOH SAMED ISLAND, CHUMPHON PROVINCE*.

- THAILAND*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(2), 162-172.
- Sinarti, T., & Churiyah, M. (2023). *Determination Of Success Strategies For Women Entrepreneurs SWOT-Based*. International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities, 1(2), 14-23.
- Sutanto, S. H., Putri, F. J., Herlianti, N., Jauza, R., Guritna, W., & Syamsir, S. (2022, November). *Reformasi Administrasi Pelayanan Berbasis Online pada Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padang*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 2, pp. 120-131).
- Warman, N. S., Syamsir, S., Maldini, M., Nurhasanah, O., Oktariandani, N. R., & Syafikruzi, I. H. (2022, November). *Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 2, pp. 132-148).